

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Judul SOP	Disahkan Oleh	Tanggal Efektif	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan	Nomor SOP
Pelayanan hadan bantuan Pemeriksaan Setempat dari	Ketua Region Ke	04 September 2017	00	04 September 2017	SOP/AP/21

)AS	DASAR HUKUM	
		 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasan Kehakiman 	
H	2	Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung	ļ

- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
- telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola
- Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara

 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang
- Kepaniteraan Pengadilan Agama

 V. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang

 Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA

 Memahami tentang proses pelayanan pemeriksaan setempat dari pengadilan agama lain

Pengadilan Agama Lain

- Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan pemeriksaan setempat dari pengadilan agama lain
- . Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

penggugat 6. Sidang per 7. Bila bukti hakim waj	Biaya P	4. Jika tan: bantuan sengketa meminta	tentang letak lua secara terperinci memutus perkara	 2001 ten Majelis 	2. Hakim	l. Jika SOI	PERINGATAN		Manual Mutu	KETERKAITAN
penggugat Sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan kantor pemerintahan Bila bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara bukan sertifikat majelis hakim wajib memeriksa buku leter C didesa tersebut.	Biaya PS dipungut hanya untuk keperluan transportasi yang dibebankan kepada	Jika tanah terletak diluar wilayah yuridiksi, maka pengadilan agama meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan agama tempat tanah sengketa berada dan berita acaranya dikirim kepada pengadilan agama yang meminta	tentang letak luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan dari keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara	2001 tentang pemeriksaan setempat. Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara terutama	Hakim wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun	Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pemanggilan saksi tidak dapat berjalan dengan	N		Autu	AN
			6. Buku Bantu Keuangan Pemeriksaan Setempat	Relaas Panggilan Surat Permohonan Pemeriksaan Setempat	3. Penetepan Panitera Pengganti	Penetapan Hari Sidang (PHS) Penetapan Jurnista	PENCATATAN DAN PENDATAAN	3. Jaringan internet	 Data-data pendukung Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 	PERALATAN / PERLENGKAPAN

7	Zo		_		2		w		4				5		6			7
	Kegiatan		Bagian umum menerima surat mohon bantuan pemeriksaan saksi dari PA lain	(lanjut ke SOP Penanganan Surat Masuk)		proses pemeriksaan saksi (anjut ke sori penetapan majelis hakim)	_	jurusita untuk (Lanjut SOP Penunjukan PP	+	untuk melakukan pemeriksaan setempat	(lanjut ke SOP Penetapan Hari Sidang	(PHS))		panggilan para pihak dan menyerahkan Langda Turusita melalui Panitera Pengganti			Pihak)	Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (lanjut ke SOP Pelayanan
	Bagian Umum				Г													
	Panitera							-[
Pelaksana	Ketua majelis	Hkm										+	ŀ	-[†)•
sana	Pan / Pan.	Pengg																
	Juru sita / JSP															-		
	Ketua																	
	Kelengkapan	•	Surat masuk	Surat pengantar		НМД	TIMIT		Instrument Fr dan 33			PHS	***************************************		Instrument Pangguan		Berkas Perkara	
Mutu Baku	Waktu		8 Jain	lhari		lhari.			THOLL			10	menit	2	o Jam		1 Hari	
Others	Output	2	Disposisi	PMH		Instrument	PP dan JS	DITE				Instrument	Panggilan		Panggilan		Berita acara	sidang
Kata	rangan																	

					DOKUMEN KADALUARSA
					DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
			1	1	DOKUMEN TEKKENDALI
 	 	NO. SALINAN			יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
			~		DOKUMEN MASTER

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA